BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang multi dimensional. Islam memberikan pandangan, keyakinan dan jalan hidup bagi umat manusia agar mampu mengatasi segala masalah di dunia dan mengantarkannya kepada kehidupan kekal bahagia di akhirat kelak. Dalam konteks inilah Islam memberikan tekanan pada keseimbangan kehidupan, yakni memandang kehidupan di dunia sama pentingnya dengan kehidupan di akhirat kelak, selain itu Islam juga memandang kehidupan individu sama pentingnya dengan pembangunan kehidupan sosial, mencari nafkah untuk kehidupan dunia sama pentingnya dengan pergi ke mesjid untuk beribadah. Islam tidak melarang penganutnya untuk berusaha melarang mencari harta, hanya saja ketika seseorang sudah berhasil mendapatkan harta, maka harus diingat bahwa di dalam harta itu terdapat hak yang harus diberikan kepada mereka yang kurang beruntung dan terjerat dalam kemiskinan.¹

Islam memandang bahwa harta kekayaan adalah mutlak milik Allah SWT, sedangkan manusia hanya sebatas diberi amanah dalam hal pengurusan dan pemanfaatannya saja karena harta kekayaan yang diperoleh adalah amanah yang harus dipertanggung-jawabkan setiap pembelanjannya diakhirat nanti. Dengan demikian, setiap muslim yang harta kekayaannya telah mencapai nisab dan haul berkewajiban untuk mengeluarkan zakat.

¹Umrotul Khasanah , *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2016), h. 2-3.

Zakat termasuk suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Alquran, Sunnah Nabi, dan Ijma' para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan salat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam sebagaimana rukun Islam lainnya (salat, puasa, dan haji) tentunya didasarkan atas landasan hukum yang bersumber dari sumber utama hukum Islam, yaitu Alquran dan Al-Hadis.²

Dalam Alquran terdapat berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya, karena itu, khalifah Abu Bakar As-Siddiq bertekad memerangi orang-orang yang salat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan kedurhakaan dan kemaksiatan lain. Zakat merupakan kewajiban yang tercantum dalam Alquran. Artinya jika kita mengerjakannya, kita dapat pahala. Jika tidak, akan mendapat dosa. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Q.S. Al Baqarah/2: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”(Q.S. al-Baqarah: 43)³

²Fakhrudin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang : UIN-Malang Press,2008), Cet Ke-1, h. 43.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : PT Intermasa, 1993), h. 16.

Ayat tersebut menerangkan bahwa salat dan zakat merupakan dua pilar utama dari keislaman seseorang. Salat dimaksudkan sebagai peneguh keislaman seseorang sebagai hamba Tuhan secara personal, sedangkan zakat dianggap sebagai cara untuk mengejawentahkan diri pada dimensi sosial selaku khalifah di muka bumi. Manusia tidak dianggap sempurna jika hanya berkecimpung pada salah satu dimensi saja. Penggabungan keduanya adalah sebuah keniscayaan.⁴

Landasan yang berasal dari sunnah Nabi SAW adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالصَّلَاةِ، وَالْعَفَافِ»
(رواه البخارى)⁵

Artinya: "Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata : aku di beritahu oleh Abu Sufyan ra,. Lalu ia menyebutkan hadis Nabi saw. Ia mengatakan : “Nabi saw menyuruh kita supaya mendirikan salat, menunaikan zakat, silaturahmi (menghubungi keluarga) dan Ifaf (yakni menahan diri dari perbuatan buruk. (HR Bukhari).⁶

Allah memberikan keleluasan kepada orang-orang Islam untuk bergiat dalam perdagangan, dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya seperti kejujuran, kebenaran dan kebersihan, serta tidak hanyut terbawa kesibukan dagang sehingga lupa

⁴Sudirman MA, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang : UIN-Malang Press,2007), h. 2.

⁵Abu Abdillah Muhammad Al Bukhori, *Shahih Al-Bukhori* Juz 1, (Beirut: Dar EL-Fikr,1994M), h. 133.

⁶ Achmad Sunarto, *Tarjamah Shahih Bukhari*, Jilid II, (Semarang: CV. Asy Syifa',1992), h.320.

mengingat dan menunaikan kewajiban terhadap Allah.⁷ Perdagangan telah menjadi mata pencaharian yang memberikan hasil tidak sedikit, dan telah memiliki kekayaan. Islam mewajibkan dari kekayaan yang diinvestasikan dan diperoleh dari perdagangan itu agar di keluarkan zakatnya setiap tahun sebagai tanda terima kasih kepada Allah, membayar hak orang-orang yang berhak, dan ikut berpartisipasi buat kemaslahatan umum demi agama dan negara yang merupakan setiap jenis zakat.

Salah satu landasan zakat perdagangan ialah firman Allah :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ
 الْاَرْضِ.....^ط

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (QS. Al Baqarah: 267)⁸

Imam Thabrani menafsirkan ayat tersebut dengan zakat usaha (dagang).

Demikian juga pendapat Hasan dan Mujahid, Imam Zarkasi dalam kitab Ahkam Al-Qur'an, bahwa yang dimaksud dengan kalimat :”sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik” adalah “hasil perdagangan”.⁹

Selain ayat di atas dapat dijadikan dalil adalah sabda Nabi SAW :

⁷Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits*, (Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 1996), h. 297.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : PT Intermedia, 1993), h. 67.

⁹ M.Ali Hasan, *Zakat dan Infak : Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 48

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّ لِلْبَيْعِ» (رواه أبو داود)¹⁰

Artinya : “Dari Samurah bin Jundub R.A. dia berkata : *Ammā Ba’dū*, sesungguhnya Rasulullah SAW biasa menyuruh kita agar mengeluarkan zakat dari harta yang kita persiapkan untuk jual beli.” (H.R. Abu Daud)¹¹

Dalam hadis tersebut ada kalimat perintah untuk bersedekah. Kalimat perintah menunjukkan wajib dilaksanakan dan zakat itu hukumnya wajib, sedangkan sedekah hukumnya sunnah.¹²

Dari ayat dan hadis di atas jelaslah bahwa Allah SWT mewajibkan harta kekayaan hasil dagang termasuk juga ke dalam salah satu harta yang wajib dizakati sebagaimana para sahabat, tabi’in dan ulama salaf juga melaksanakan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Zakat harta perdagangan adalah wajib menurut empat mazhab, tetapi menurut Imamiyah adalah sunnah. Bila direnungkan dan cermati maka sangat pantas mengeluarkan zakat perdagangan karena hasilnya merupakan kekayaan yang dimiliki. Yang dinamakan harta dagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri. Kalau harta yang dimilikinya itu merupakan harta warisan, maka ulama mazhab secara sepakat tidak menamakannya harta dagangan.¹³

¹⁰Sulaiman Ibnu Asy’ats Abu Daud Sijistani, *Sunan Abi Daud* Juz 2, (Beirut: Dar El-Fikr,1994), h. 6.

¹¹Hafizh Al-Munzdiry, *Mukhtasar Sunan Abi Daud*, terj. Bey Arifin dan A. Syinqithi Djamaluddin, (Semarang: CV. Asy Syifa,1992,), h.365.

¹²M.Ali Hasan, *Zakat dan Infak*. h. 48

¹³Mughniyah Muhammad Jawad, *Al-fiqh ‘ala Madzahib Al-Khamsah*, ter. Masykur A.B, Afif m, Idrus Al kaff (Jakarta : Basrie Press, 1994), h. 241.

Ibnu Qudamah dalam *Al-Mugni* berkata, suatu barang tidak dapat dikatakan sebagai barang perniagaan kecuali jika memenuhi dua syarat, yaitu :

Pertama: Harta benar-benar menjadi hak miliknya, seperti hasil dari jual beli, perkawinan, *khulu'*, hadiah, hibah, wasiat, rampasan perang, dan hasil usaha yang diharamkan. Sebab, barang yang bukan hak milik, ia tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Niat berdagang saja tidaklah cukup apabila seseorang tidak memiliki barang, karena masalah ini berbeda dengan berpuasa. Banyak cara untuk memiliki sesuatu barang; adakalanya dengan cara barter, seperti halnya jual beli. Adakalanya tanpa melalui penukaran, seperti harta warisan. Semua ini merupakan cara kepemilikan dan wajib dikeluarkan zakatnya apabila diperdagangkan.

Kedua: selain barang itu benar-benar menjadi miliknya, barang tersebut harus diniatkan untuk dikomersilkan. Jika tidak demikian, barang tersebut bukan barang komersil, walaupun niat itu muncul setelah perniagaan dijalankan. Sebab, asal mula barang tersebut bukan untuk diniagakan, sementara perniagaan bersifat kondisional berdasarkan keinginan para pemiliknya untuk mengelolanya. Oleh karena itu, status harta tidak akan berubah dengan sendirinya dengan hanya mengkomersilkannya.¹⁴

Tidaklah semua yang dibeli manusia adalah kekayaan dagang, oleh karena orang itu mungkin membeli pakaian, misalnya, untuk dipakai sendiri, atau membeli perabot untuk rumahnya, atau membeli kuda atau mobil untuk ditunggangi dan dikendarai sendiri. Semuanya itu bukanlah kekayaan dagang

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Khairul Amru Harahap dan Masrukhin. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 86-87.

tetapi disebut kekayaan tersimpan, berbeda dengan sesuatu yang dimaksudkan untuk dijual lagi untuk memperoleh keuntungan.

Zakat perdagangan ialah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli.¹⁵ Dari zakat perdagangan itu dikeluarkan sesuai dengan apa yang sudah menjadi ketentuan dalam hukum Islam. Sebagai tanda terima kasih kepada Allah, membayar hak-hak orang yang berhak, dan ikut berpartisipasi buat kemashlahatan umum demi agama dan negara yang merupakan kepentingan setiap jenis zakat.¹⁶

Seorang pedagang muslim bila sudah sampai pada tempo pengeluaran zakat, maka ia harus menggabungkan seluruh kekayaan, baik berupa modal, laba, simpanan dan piutang yang bisa diharapkan kembali, lalu mengkosongkan semua dagangannya dan menghitung semua barang ditambah dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan maupun yang tidak, ditambah lagi dengan piutang yang diharapkan bisa kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya 2,5%. Sedangkan piutang yang tidak mungkin kembali, maka piutang tersebut tidak ada zakatnya, sampai orang itu menerima piutang untuk kemudian dikeluarkan zakatnya untuk satu tahun.¹⁷

Di dalam perdagangan pasti ada barang yang dijual atau yang disebut dengan *'ain* dan setelah barang dihitung harganya dari perdagangan tersebut akan dikeluarkan zakatnya sebagaimana yang di ajarkan oleh agama Islam dan yang

¹⁵Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, h. 108.

¹⁶Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 297-298.

¹⁷ Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, h. 115-116.

dipergunakan untuk mengeluarkan zakat perdagangan tersebut apakah dengan mengeluarkan zakat dari *'ain* dalam artian mengeluarkan zakat dari barang-barang dagangan atau dari *qīmah* yang bisa juga di sebut dengan nilai harga dalam artian uang dari barang yang di jual.

Adapun dalam permasalahan ini terdapat beberapa pendapat, ulama mazhab berbeda pendapat di antaranya yaitu mazhab Hanafi menyatakan bahwa pedagang bisa memilih antara barang dagangan atau nilainya. Pemilik barang bisa memilih ketika genap satu tahun atau ketika telah mencapai haul antara mengeluarkan zakat dari nilai dagangan lalu dia mengeluarkan zakat 2,5% dari nilai harga barang atau mengeluarkan zakat dengan barang itu sendiri. Sedangkan mazhab Syafi'i menyatakan bahwa zakat harus dikeluarkan berupa uang (*qīmah*) yang akan dipergunakan untuk mengeluarkan zakat perdagangan dan tidak boleh mengeluarkannya dalam bentuk *'ain* yang diperdagangkan atau barang-barang yang diperdagangkan.

Di sini penulis menemukan perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, perbedaan inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut, yang penulis tuangkan dalam **judul “ZAKAT PERDAGANGAN DENGAN ‘AIN MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI’I”**.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang di kemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat dan metode *istinbāṭ* hukum mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai zakat perdagangan dengan '*ain*'?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai zakat perdagangan dengan '*ain*'?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada yaitu :

1. Mengetahui pendapat beserta metode *istinbāṭ* mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang permasalahan zakat perdagangan dengan '*ain*'.
2. Mengetahui persamaan dan perbedaan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dalam menganalisis pendapat tentang zakat perdagangan dengan '*ain*'.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, untuk memberikan jawaban atas permasalahan pokok dalam penelitian ini.
2. Secara praktis, sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran serta bahan pertimbangan bagi orang-orang tentang zakat perdagangan dengan '*ain*' menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.
3. Bahan ilmiah bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dalam permasalahan yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.

4. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui lebih dalam permasalahan ini.
5. Khazanah kepustakaan bagi kampus IAIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Perbandingan Mazhab dalam pembahasan “zakat perdagangan dengan *‘ain* menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i.

E. Batasan Istilah

Untuk memperjelas maksud dari judul di atas dan menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahaminya, maka penulis perlu mengemukakan batasan istilah yaitu sebagai berikut:

1. Zakat, jumlah harta tertentu yang wajib di keluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (faqir, miskin dan sebgainya) menurut ketentuan yang telah di tetapkan oleh *syara’*, salah satu rukun Islam yang mengatur harta yang wajib dikeluarkan kepada mustahik.¹⁸ Zakat menurut bahasa adalah berkembang, bertambah. Orang arab mengatakan *zakā az-zar’u ketika az-zar’u* (tanaman) itu berkembang dan bertambah. Zakat menurut *syara’* adalah hak yang wajib pada harta.¹⁹

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), edisi ketiga, cet Ke-3, h. 1279.

¹⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut : Darul Fikr, 2007), Cet Ke-10, h. 164-165.

2. Perdagangan, ialah perihal dagang, urusan dagang atau perniagaan.²⁰ Seperti ekspor-impor, perdagangan dalam negeri, perdagangan antar pulau, pertokoan, percetakan, penerbitan, warung, kios, depot, dan sebagainya.²¹
3. *'Ain*, yaitu harta benda, harta milik dan properti.²² Atau yang bersifat barang (bukan uang).²³ maksudnya mengeluarkan zakat sesuai dengan barang yang dijual belikan.
4. Mazhab, berasal dari kata *ḥahaba-maḥhaban* yang berarti jalan atau tempat yang di lalui, mazhab juga pendirian. Sedangkan menurut istilah berarti mengikuti hasil *ijtihād* seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah *istinbāt*nya.²⁴ Maka di sini penulis batasi dengan dua mazhab saja yaitu : mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

F. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran penulis di perpustakaan maupun internet terhadap skripsi-skripsi, jurnal, majalah dan buku. Sampai saat ini, penulis masih merasa kesulitan untuk mendapatkan buku yang secara khusus dan utuh menjelaskan

²⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 203.

²¹ Zakiah Dradjat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset, 1993), h. 40.

²² Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003) h. 1335

²³ *Ibid*, h.1336.

²⁴ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fikih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), Cet.I,h.1.

tentang zakat perdagangan dengan *'ain* menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i ini. Berdasarkan daftar judul skripsi dari Jurusan Perbandingan Mazhab, penulis menemukan kajian penelitian yang diteliti oleh Aulia Rahman/9801122359 (2004) dengan judul "Zakat Fitrah Dengan Uang Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i".Penelitiannya lebih kepada menjelaskan tentang bagaimana zakat fitrah dengan uang.

Skripsi di atas berbeda dengan yang penulis teliti, karena penelitian ini sama mengenai zakat tetapi berbeda dari jenis zakat yang ingin dikeluarkan. Perbedaannya adalah peneliti zakat fitrah dengan uang meneliti tentang bagaimana mengeluarkan zakat fitrah dengan uang sedangkan penulis meneliti tentang zakat perdagangan dengan *'ain*. sehingga penelitian ini pada esensi kajian, objek kajian, perspektif dan analisisnya pun berbeda.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian normatif yaitu dengan cara terjun ke perpustakaan untuk menghimpun data dari bahan-bahan pustaka (literatur) yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti yaitu yang membahas masalah zakat perdagangan dengan *'ain* menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Adapun sifat penelitian ini adalah studi deskriptif komparatif.

2. Bahan dan Sumber Hukum

Kajian ini merupakan kajian penelusuran kepustakaan. Untuk itu penyusunan menggunakan 3 sumber data, yang mana ketiga sumber digunakan sebagai rujukan dari penelitian.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan pokok yang digunakan penulis untuk dijadikan kajian dalam proposal ini, yang mana penulis menggunakan rujukan :

- 1) Kitab hadis *Ṣaḥiḥ* Bukhori
- 2) Kitab hadis *Al-Sunan Al-Ṣagīr*

Mazhab Hanafi penulis menggunakan rujukan :

- 1) Kitab *Badāi' u Al-Ṣanā' i fī Tartīb Al-Syarāi'* karangan Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kassaniy Al-Hanafiyy.
- 2) Kitab *Al-Mabṣūṭ* karangan As-Sarkhasi.

Mazhab Syafi'i penulis menggunakan rujukan :

- 1) Kitab *Al-Umm* karangan Al-Imam Asy-Syafi'I
- 2) Kitab *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓhab* karangan Al-Imam Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syarf An-Nawawi.
- 3) Kitab *I'ānah Al-Ṭālibīn* karangan Abu Bakar Al-Masyhur.
- 4) *Hāsyiyah Al-Bājūrī* karangan Ibrahim Al-Bajuri

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Kitab hadis *Ṣaḥiḥ* Muslim
- 2) Kitab hadis Sunan Abu Daud
- 3) Kitab hadis Sunan Ibnu Majah

- 4) *Al-Asybah wa Al-Nazair* karangan Abdurrahman bin Abdurrahman As-Suyuthi.
- 5) *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu* karangan Wahbah az-Zuhaili
- 6) *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah* karangan Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait
- 7) *Fiqh Al-Zakah* karangan Yusuf Qardhawi
- 8) *Fikih Imam Syafi'i* karangan Wahbah Az-Zuhaili
- 9) *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits* karangan Yusuf Qardhawi.
- 10) *Kajian Berbagai Mazhab* karangan Wahbah Az-Zuhaili
- 11) *Mauqi'u Al-Islam Sual wa Jawab* karangan Muhammad Sholih Al-Munjid
- 12) *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* karangan Fakhruddin.
- 13) *Perbandingan Mazhab Fikih* karangan M. Ali Hasan.
- 14) *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, terbitan Depertemen Agama R.I tahun 1992.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik survei kepustakaan, yaitu mencari dan menghimpun data berupa literatur-literatur yang terkait dari perpustakaan dan sumber lain. Adapun yang menjadi tempat survei penulis adalah Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

4. Teknik Pegoalahan Data dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain :

- 1) Seleksi data, yaitu mengkaji dan meneliti data yang telah terkumpul untuk mengetahui kelengkapannya kemudian segera diproses lebih lanjut, sehingga diperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 2) Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang sesuai dengan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.
- 3) Interpretasi Data, yaitu dengan memberikan penjelasan seperlunya terhadap data yang dirasakan sulit dan kurang jelas, sehingga mudah memahaminya.

b. Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif komparatif, yaitu dengan melakukan penelaahan dan pegkajian secara mendalam terhadap data yang diperoleh dengan jalan membandingkannya, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II memaparkan landasan teoritis dengan sub bab pembahasan tentang zakat perdagangan secara umum maupun secara khusus menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, dasar atau dalil-dalil yang terkait Zakat Perdagangan dengan *'ain*, serta pendapat para ulama mengenai zakat perdagangan dengan *'ain*.

Bab III merupakan landasan teoritis penelitian ini yang memuat tentang biografi mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, terdiri dari pendiri mazhab bersangkutan, dasar hukumnya dalam menetapkan hukum, kategori *istinbāḥ* hukumnya, serta tokoh-tokoh dan kitab-kitab fikih masing-masing mazhab.

Bab IV Data dan Analisis perbandingan perbandingan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang zakat perdagangan dengan *'ain*, memuat persamaan dan perbedaan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i serta menguraikan *'illat* hukum perbedaan dan persamaan pendapat dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

Bab V Penutup, yang memuat simpulan dan saran-saran yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.